

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Keagenan

Teori keagenan (*agency theory*) erat hubungannya dengan *corporate governance*. Teori ini adalah dasar yang digunakan perusahaan untuk memahami *corporate governance*. Teori keagenan membahas hubungan antara prinsipal (pemilik dan pemegang saham) dan agen (manajemen). Jensen dan Meckling (1976) dalam Rini (2010) menyatakan bahwa hubungan keagenan muncul ketika satu atau lebih individu (*principal*) mempekerjakan individu lain (agen) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan kekuasaan kepada agen untuk membuat suatu keputusan atas nama *principal* tersebut.

Teori keagenan mampu menjelaskan potensi konflik kepentingan diantara berbagai pihak yang berkepentingan dalam perusahaan tersebut. Hal ini menjadi dasar perlunya manajemen melakukan pelaporan dan pengungkapan mengenai perusahaan kepada pemilik sebagai wujud akuntabilitas manajemen terhadap pemilik.

Teori keagenan mengasumsikan bahwa masing-masing individu cenderung untuk mementingkan diri sendiri. Manajer sebuah perusahaan mungkin memiliki tujuan-tujuan pribadi yang bersaing dengan tujuan untuk memaksimalkan kekayaan pemilik pemegang saham. Hak yang dimiliki manajer untuk mengelola aset perusahaan, menimbulkan adanya konflik kepentingan antara dua kelompok, maka terdapat dua kepentingan

yang berbeda konflik kepentingan antara dua kelompok, maka terdapat dua kepentingan yang berbeda didalam perusahaan yang masing-masing pihak berusaha untuk mencapai tingkat kemakmuran yang diinginkan.

Teori keagenan mengasumsikan, dalam pasar modal dan tenaga kerja yang tidak sempurna, manajer akan berusaha untuk memaksimalkan utilitas mereka sendiri, dengan mengorbankan kepentingan para pemegang saham. Agen memiliki kemampuan untuk beroperasi dengan kepentingan mereka sendiri daripada kepentingan terbaik perusahaan disebabkan oleh informasi yang bersifat asimetris (Hikmah dkk, 2011). Konflik antara agen dan prinsipal dapat diminimalisasi dengan berbagai cara, salah satunya adalah melalui pengungkapan informasi oleh manajemen (agen). Di samping untuk mengurangi informasi yang asimetris, juga sebagai bentuk pertanggungjawaban oleh manajemen. Sejalan dengan berkembangnya isu mengenai *corporate governance* yang di dalamnya terdapat prinsip transparansi dan akuntabilitas, akan meningkatkan perhatian terhadap masalah pengungkapan pada aspek *corporate governance* suatu perusahaan (Hikmah dkk, 2011).

2. Luas Pengungkapan dalam Laporan Tahunan

Laporan tahunan berisi pengungkapan informasi yang dapat membantu *stakeholders* dalam pengambilan keputusan. Informasi yang diungkapkan tidak hanya berupa informasi keuangan saja, tetapi juga berupa informasi non keuangan. Selain digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, pengungkapan dalam laporan tahunan juga

digunakan sebagai bentuk akuntabilitas manajemen atas kinerjanya sebagai pengelola perusahaan kepada investor sebagai pemilik.

Di Indonesia, BAPEPAM telah mengatur bentuk dan isi laporan tahunan yang wajib diungkapkan melalui Keputusan Ketua BAPEPAM dan Lembaga Keuangan No. KEP-134/BL/2006 peraturan X.K.6 tanggal 07 Desember 2006 tentang kewajiban penyampaian laporan tahunan bagi emiten atau perusahaan-perusahaan publik. Dalam ketentuan umum bentuk dan isi laporan tahunan, disebutkan bahwa laporan tahunan wajib memuat ikhtisar data keuangan penting, laporan dewan komisaris, laporan direksi, profil perusahaan, analisis dan pembahasan manajemen, tata kelola perusahaan, tanggung jawab direksi atas laporan keuangan, dan laporan keuangan yang telah diaudit.

Hal itu menunjukkan bahwa setiap perusahaan di Indonesia wajib membuat laporan tahunan perusahaan yang terdiri dari:

- a. Ikhtisar data keuangan penting
- b. Laporan dewan komisaris
- c. Laporan dewan direksi
- d. Profil perusahaan
- e. Analisis dan pembahasan manajemen
- f. Tata kelola perusahaan
- g. Tanggung jawab direksi atas laporan keuangan
- h. laporan keuangan yang telah diaudit

3. *Corporate Governance*

Menurut Hikmah dkk (2011) *Corporate Governance* menurut *Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)* yaitu sebagai suatu sistem dimana sebuah perusahaan atau entitas bisnis diarahkan dan diawasi. Sejalan dengan itu, maka struktur dari *corporate governance* menjelaskan distribusi hak-hak dan tanggungjawab dari masing-masing pihak yang terlibat dalam sebuah bisnis, yaitu antara lain dewan komisaris dan direksi, manajer, pemegang saham, serta pihak-pihak lain yang terkait sebagai *stakeholders*. Selanjutnya, struktur dari *corporate governance* juga menjelaskan bagaimana aturan dan prosedur dalam pengambilan dan pemutusan kebijakan sehingga dengan melakukannya maka tujuan perusahaan dan pemantauan kinerjanya dapat dipertanggungjawabkan dan dilakukan dengan baik.

4. *Corporate Governance* dan Perusahaan Manufaktur di Indonesia.

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) mendefinisikan *corporate governance* sebagai suatu sistem dimana sebuah perusahaan atau entitas bisnis diarahkan dan diawasi. Sejalan dengan itu, maka struktur dari *corporate governance* menjelaskan distribusi hak-hak dan tanggung jawab dari masing-masing pihak yang terlibat dalam sebuah bisnis, yaitu antara lain dewan komisaris dan direksi, manajer, pemegang saham, serta pihak-pihak lain yang terkait sebagai *stakeholders*. Struktur dari *corporate governance* juga menjelaskan bagaimana aturan dan prosedur dalam pengambilan dan

pemutusan kebijakan sehingga dengan melakukan itu semua maka tujuan perusahaan dan pemantauan kinerjanya dapat dipertanggungjawabkan dan dilakukan dengan baik (OECD, 1999)

Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) dalam Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia tahun 2006 mengidentifikasi asas-asas yang melandasi penerapan *corporate governance* yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan.

Perusahaan manufaktur adalah sebuah industri yang bekerja untuk menghasilkan suatu barang yang sesuai dengan kebutuhan dari konsumen, dimana proses produksi dilakukan untuk mengubah bahan baku menjadi barang jadi atau barang yang siap digunakan. Perusahaan manufaktur di Indonesia pada saat ini telah menunjukkan perkembangan yang cukup baik setelah adanya krisis ekonomi akibat dari terjadinya krisis ekonomi yang terjadi di Amerika dan Eropa. Perusahaan manufaktur di Indonesia sedikit demi sedikit mampu menata kembali usaha yang dijalankannya. Dengan adanya pedoman umum *corporate governance* sejak tahun 2006, perusahaan manufaktur di Indonesia mampu menerapkan transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan dalam perusahaan.

5. Luas Pengungkapan *Corporate Governance* dalam Laporan Tahunan

Laporan tahunan merupakan sumber utama didalam melakukan penelitian mengenai pengungkapan *corporate governance*, sebab laporan

tahunan berisi berbagai macam informasi mengenai perusahaan termasuk praktik *good corporate governance* (Hikmah dkk, 2011). Pengungkapan *corporate governance* pada laporan tahunan tidak terbatas pada pengungkapan yang diwajibkan oleh pemerintah sehingga pengungkapan di luar persyaratan minimal dianggap sebagai pengungkapan sukarela. Kewajiban penyampaian laporan tahunan bagi perusahaan publik telah diatur di dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-134/BL/2006.

Peraturan tersebut mengatur kewajiban penyampaian laporan tahunan serta bentuk dan isinya, dari sekian banyak informasi yang wajib disampaikan dalam laporan tahunan, disebutkan bahwa laporan tahunan wajib memuat uraian singkat mengenai penerapan tata kelola perusahaan (*corporate governance*) dalam periode laporan keuangan terakhir. Dalam penelitian ini, item pengungkapan yang digunakan berasal dari pengungkapan wajib yang diatur dalam Keputusan Ketua BAPEPAM dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-134/BL/2006 Peraturan Nomor X.K.6 dan yang diperoleh dari Pedoman Umum *Good Corporate Governance* (KNKG, 2006).

6. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Luas Pengungkapan *Corporate Governance*.

a. Ukuran Perusahaan

Pada umumnya perusahaan besar akan mengungkapkan informasi yang lebih banyak dibandingkan dengan perusahaan kecil. Ada beberapa penjelasan yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dapat berpengaruh terhadap luas pengungkapan. Pertama, teori agensi menyatakan bahwa perusahaan besar memiliki biaya keagenan yang lebih besar daripada perusahaan kecil (Jensen dan Meckling, 1976 dalam Rini, 2010).

Perusahaan besar mungkin akan mengungkapkan informasi yang lebih banyak sebagai upaya untuk mengurangi biaya keagenan. Kedua, perusahaan besar menghadapi biaya politis yang lebih besar daripada perusahaan kecil. Perusahaan besar merupakan entitas yang banyak disorot oleh pasar maupun publik secara umum. Mengungkapkan lebih banyak informasi merupakan bagian dari upaya perusahaan untuk mewujudkan akuntabilitas publik. Terakhir, perusahaan besar memiliki sumber daya yang besar. Dengan sumber daya yang besar tersebut perusahaan perlu dan mampu membiayai penyediaan informasi untuk kepentingan internal.

Sebaliknya, perusahaan dengan sumber daya yang kecil mungkin tidak memiliki cukup banyak informasi sehingga perlu ada tambahan biaya yang relatif besar untuk dapat melakukan pengungkapan

selengkap yang dilakukan oleh perusahaan besar. Perusahaan kecil umumnya berada pada situasi persaingan yang ketat dengan perusahaan lain. Mengungkapkan terlalu banyak tentang jati dirinya kepada pihak eksternal dapat membahayakan posisinya dalam persaingan, sehingga perusahaan kecil cenderung untuk tidak melakukan pengungkapan selengkap perusahaan besar (Singhvi dkk, 1971 dalam Rahmawati dkk, 2007).

b. Umur Listing Perusahaan

Menurut Yularto dan Chariri (2003), umur perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan dapat tetap bertahan atau eksis, mampu bersaing, dan memanfaatkan peluang bisnis dalam suatu perekonomian. Perusahaan yang memiliki umur lebih tua mungkin akan meningkatkan praktik pengungkapan dari waktu ke waktu. Hal ini dikarenakan perusahaan yang lebih tua dianggap telah memiliki lebih banyak pengalaman dalam pengungkapan laporan tahunannya. Perusahaan yang telah memiliki pengalaman lebih banyak akan lebih memahami kebutuhan penggunanya dan informasi yang lebih detail mengenai perusahaan yang harus dibuka kepada pihak-pihak di luar manajemen yang berkepentingan terhadap perusahaan.

c. Kepemilikan Dispersi

Menurut Alsaeed (2006) dalam Rini (2010), kepemilikan dispersi diwakili oleh persentase saham yang dimiliki oleh investor individu di luar manajemen selain pemerintah, institusi nasional dan

asing, serta kalangan keluarga. Dalam teori agensi, dinyatakan bahwa perusahaan dengan tingkat kepemilikan dispersi yang tinggi akan melakukan pengungkapan yang tinggi pula. Hal ini terjadi karena dengan adanya kepemilikan dispersi, pemilik akan meminta pengungkapan lebih untuk mengawasi perilaku oportunistik manajemen dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki kepemilikan terkonsentrasi.

d. Profitabilitas

Brigham dan Houston (2001) menyatakan bahwa profitabilitas adalah hasil bersih dari serangkaian kebijakan dan keputusan. Profitabilitas menurut Mamduh dan Halim (2003) dalam Almilialia (2007) merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dalam upaya meningkatkan nilai pemegang saham. Semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan maka akan sangat diperlukan pengungkapan *corporate governance* dalam laporan tahunan perusahaan.

e. Ukuran Dewan Komisaris

Ukuran dewan komisaris merupakan jumlah anggota dewan komisaris yang dimiliki oleh perusahaan, terdiri dari komisaris utama, komisaris independen, dan komisaris. Kedudukan masing-masing anggota dewan komisaris, termasuk komisaris utama adalah setara. Pada teori agensi, dewan komisaris dibutuhkan untuk

memonitor dan mengendalikan tindakan manajer karena perilaku oportunistanya (Jensen dan Mecking, 1976 dalam Rini, 2010).

Dewan komisaris sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggungjawab untuk melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada dewan direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan *good corporate governance* (Komite Nasional Kebijakan *Governance*, 2006). Akan tetapi, dewan komisaris tidak diperbolehkan untuk ikut serta dalam mengambil keputusan operasional. Semakin besar jumlah anggota dewan komisaris, maka akan semakin mudah untuk mengendalikan manajemen dan monitoring yang dilakukan akan semakin efektif.

f. Leverage

Leverage adalah kemampuan perusahaan untuk menggunakan aktiva atau dana yang mempunyai beban tetap untuk memperbesar tingkat penghasilan bagi pemilik perusahaan. *Leverage* merupakan alat untuk mengukur seberapa besar perusahaan tergantung pada kreditur dalam membiayai aset perusahaan. Perusahaan yang mempunyai tingkat *leverage* yang tinggi berarti sangat tergantung pada pinjaman luar untuk membiayai asetnya. Sedangkan perusahaan yang mempunyai tingkat *leverage* rendah lebih banyak membiayai asetnya dengan modal sendiri. Dengan demikian, tingkat *leverage* perusahaan, menggambarkan risiko keuangan perusahaan.

B. Hasil Penelitian Terdahulu dan Penurunan Hipotesis

1. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan *Corporate Governance*

Ukuran perusahaan adalah variabel yang sering diteliti dalam hubungannya dengan luas pengungkapan (Hikmah dkk, 2011). Pengaruh ukuran perusahaan dengan luas pengungkapan dapat dijelaskan melalui teori agensi dimana dinyatakan bahwa perusahaan besar memiliki biaya keagenan yang lebih besar daripada perusahaan kecil (Jensen dan Meckling, 1976 dalam Rini, 2010).

Ukuran perusahaan dapat dinyatakan dalam total aset, penjualan, dan kapitalisasi pasar (Hikmah dkk, 2011). Ketiga variabel ini digunakan karena dapat mewakili seberapa besar perusahaan tersebut. Semakin besar aset, maka semakin banyak modal yang ditanamkan oleh investor. Semakin besar penjualan, maka semakin banyak perputaran uang dalam perusahaan.

Penelitian Rini (2010) yang membuktikan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan. Kemudian penelitian Hikmah dkk (2011) yang membuktikan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan *corporate governance*.

Perusahaan besar akan mengungkapkan informasi yang lebih banyak dalam upaya mengurangi biaya keagenan. Perusahaan besar yang memiliki sistem informasi pelaporan yang lebih baik cenderung

memiliki sumber daya untuk menghasilkan lebih banyak informasi dan biaya untuk menghasilkan informasi tersebut lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki keterbatasan dalam sistem informasi pelaporan. Perusahaan besar memiliki insentif untuk menyajikan pengungkapan *corporate governance*, karena perusahaan besar dihadapkan pada biaya dan tekanan politik yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan kecil. Perusahaan kecil cenderung untuk menyembunyikan informasi penting dikarenakan *competitive disadvantage*. Sehingga ukuran suatu perusahaan akan sangat berpengaruh terhadap luas pengungkapan *corporate governance* dalam laporan tahunan perusahaan.

Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis pertama penelitian ini sebagai berikut:

H₁: Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan *corporate governance*.

2. Pengaruh Umur *Listing* Perusahaan Terhadap Pengungkapan *Corporate Governance*

Yularto dan Chariri (2003) berpendapat bahwa umur perusahaan berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan. Perusahaan yang sudah berdiri lebih lama diasumsikan telah memiliki banyak *stakeholders*.

Semakin lama umur perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan tetap eksis (*survive*) di tengah situasi persaingan bisnis dalam melakukan pengungkapan dari tahun ke tahun. Penelitian Hikmah dkk (2011) membuktikan bahwa umur *listing* perusahaan berpengaruh terhadap luas pengungkapan *corporate governance*. Umur *Listing* menyebabkan perusahaan mengungkapkan informasi seluas-luasnya sebagai wujud dari tanggung jawab perusahaan kepada *stakeholders*. *Stakeholders* juga menuntut perusahaan untuk mengungkapkan informasi secara detail agar dapat digunakan untuk mengetahui kondisi perusahaan sebenarnya.

Perusahaan akan meningkatkan praktik pengungkapan *corporate governance* ketika perusahaan tersebut sudah lama *listing* karena perusahaan telah banyak memiliki pengalaman dalam pengungkapan laporan tahunannya dan lebih banyak pengalaman dalam pengungkapan laporan tahunannya dan lebih memahami kebutuhan pengguna informasi yang berkepentingan terhadap perusahaan. Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis kedua penelitian ini sebagai berikut:

H₂: Umur *listing* perusahaan berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan *corporate governance*.

3. Pengaruh Kepemilikan Dispersi Terhadap Pengungkapan *Corporate Governance*

Masalah *corporate governance* muncul sebagai akibat adanya perbedaan kepentingan antara pihak-pihak yang terlibat dalam perusahaan. Perbedaan tersebut dapat dikaitkan dengan struktur kepemilikan yang ada dalam perusahaan (Hikmah dkk, 2011).

Dalam teori agensi, dinyatakan bahwa tingkat pengungkapan akan lebih tinggi pada perusahaan yang mempunyai tingkat kepemilikan dispersi lebih tinggi (Haniffa dan Cooke, 2002 dalam Kusumawati, 2006). Kepemilikan dispersi merupakan kepemilikan saham yang tersebar oleh banyak investor, masing-masing investor memiliki kebutuhan mengenai informasi perusahaan yang berbeda-beda. Maka semakin terdispersinya kepemilikan saham perusahaan akan semakin luas pengungkapan mengenai *corporate governance* yang diungkapkan. Ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dari masing-masing investor dan sekaligus sebagai wujud tanggung jawabnya kepada investor.

Perusahaan semakin terkonsentrasi pada kepemilikan saham, maka semakin sedikit informasi yang akan diungkapkan dalam laporan tahunan karena pihak manajemen mempunyai akses informasi yang luas tanpa harus melalui laporan tahunan perusahaan yang dipublikasikan atau manajemen sengaja menahan informasi untuk menghindari adanya pemanfaatan dari informasi yang telah

diungkapkan oleh para pesaing perusahaan. Semakin menyebar luaskan kepemilikan saham, maka akan semakin banyak informasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan karena adanya keinginan publik untuk memperoleh informasi yang seluas-luasnya mengenai perusahaan tempat dimana ia berinvestasi dan untuk mengawasi tindakan manajemen perusahaan tersebut. Teori agensi menyatakan bahwa pengungkapan akan lebih luas pada perusahaan yang struktur kepemilikannya lebih menyebar (Haniffa dan Cooke, 2002; Kusumawati, 2006 dalam Hikmah dkk, 2011).

Penelitian Kusumawati (2007) dan membuktikan bahwa kepemilikan dispersi berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate governance* dan. Penelitian Hikmah dkk (2011) membuktikan bahwa kepemilikan dispersi tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan *corporate governance* dalam laporan tahunan. Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis ketiga penelitian ini sebagai berikut:

H₃: Kepemilikan dispersi berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan *corporate governance*.

4. Pengaruh Profitabilitas Terhadap Pengungkapan *Corporate Governance*.

Profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan mendapat laba melalui semua kemampuan, dan sumber daya yang ada

(Hikmah dkk, 2011). Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 6/10/PBI/2004 Tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, profitabilitas diukur menggunakan rasio *return on assets* (ROA), *return on equity* (ROE), *net interest margin* (NIM), dan tingkat efisiensi Bank. Dalam penelitian ini, profitabilitas diukur menggunakan rasio *return on equity* (ROE).

Pemilihan rasio ini berdasarkan argumen bahwa adanya *corporate governance* dimaksudkan terutama untuk kepentingan pemegang saham (Kusumawati, 2007). Pemegang saham ini juga secara eksplisit dinyatakan dalam Pedoman Umum *Corporate Governance*, yaitu untuk mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan lainnya (Komite Nasional Kebijakan *Governance*, 2006). Penelitian Kusumawati (2006) membuktikan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan *corporate governance*. Penelitian Hikmah dkk (2011) membuktikan bahwa profitabilitas perusahaan tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan *corporate governance* dalam laporan tahunan.

Perusahaan yang sedang mengalami penurunan profitabilitas akan cenderung mengungkapkan praktik *corporate governance* dalam laporan tahunan perusahaan. Tujuan dari pengungkapan tersebut adalah untuk mengaburkan atau menutupi sesuatu hal yang dapat membuat nilai perusahaan buruk di mata investor. Berdasarkan teori

dan hasil penelitian terdahulu, hipotesis keempat penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

H₄: Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap luas pengungkapan *corporate governance*.

5. Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Pengungkapan *Corporate Governance*.

Dewan komisaris adalah orang perusahaan yang bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada dewan direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan pengungkapan *corporate governance*. Jensen dan Meckling (1976) dalam Rini (2010) menyatakan bahwa dewan komisaris dibutuhkan untuk memonitor dan mengendalikan tindakan manajemen karena perilaku oportunitisnya.

Semakin besar jumlah anggota dewan komisaris, maka akan semakin mudah untuk mengendalikan dan mengawasi kinerja manajer secara efektif. Oleh karena itu, pengungkapan *corporate governance* terhadap laporan tahunan perusahaan yang dilakukan oleh manajemen juga akan semakin besar pengaruhnya. Penelitian Rini (2010) yang menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan *corporate governance*. Penelitian Hikmah dkk. (2011) membuktikan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap luas pengungkapan *corporate governance*

dalam laporan tahunan. Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu, hipotesis kelima dapat dirumuskan sebagai berikut:

H₅: Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan *corporate governance*.

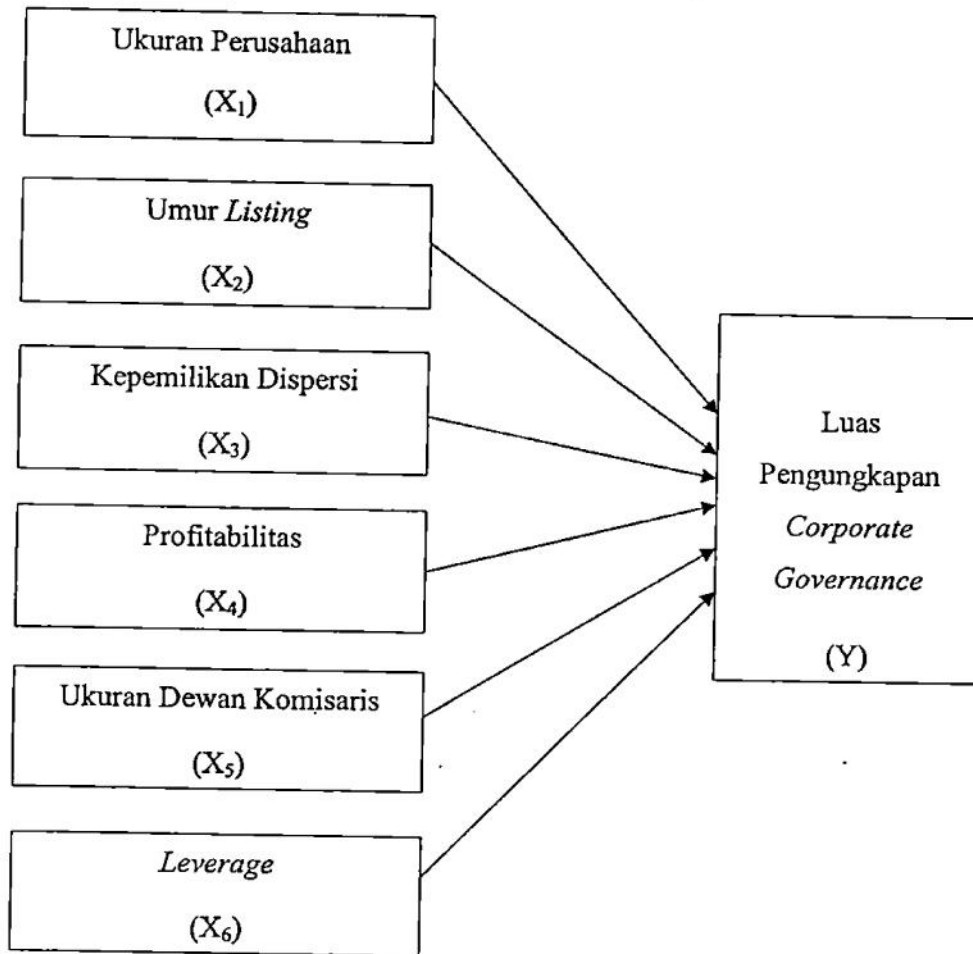
6. Pengaruh *Leverage* Terhadap Pengungkapan *Corporate Governance*.

Leverage adalah kondisi yang terjadi saat perusahaan memiliki biaya tetap yang harus ditanggung. Seberapa besar biaya tetap operasi perusahaan merupakan bagian dari biaya total operasi suatu perusahaan seperti biaya tetap pabrikasi, biaya administrasi, dan biaya penjualan. *Leverage ratio* berhubungan positif dengan pengungkapan, karena perusahaan yang berisiko tinggi berusaha untuk meyakinkan investor dan kreditor dengan pengungkapan yang lebih detail.

Kondisi dimana perusahaan memiliki biaya tetap yang harus wajib ditanggung oleh perusahaan akan menyebabkan perusahaan lebih mengungkapkan *corporate governance* dalam laporan tahunannya dengan harapan investor akan bertambah, sehingga perusahaan dapat *survive* dan dapat membiayai segala kebutuhannya. Penelitian Almilia (2007) membuktikan bahwa rasio *leverage* tidak berpengaruh terhadap kelengkapan pengungkapan. Penelitian Na'im dan Rakhman (2000) dalam Almilia (2007) menyatakan bahwa rasio *leverage* berpengaruh secara signifikan terhadap kelengkapan

pengungkapan. Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu, hipotesis keenam dapat dirumuskan sebagai berikut:

H₆: *Leverage* berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan *corporate governance*.

MODEL PENELITIAN

Gambar 2.1
Model Penelitian